

**PAMERAN**

-1 MAR 2003

120



LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA  
TAHUN ANGGARAN 2001

**ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR DENGAN MEMAKAI PENDEKATAN SWP  
(SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN)**

Peneliti :

**Drs. Ec. BUSTANI BERACHIM  
NURUL ISTIFADAH, S.E.**

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh : Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia  
DIP Nomor : 059/XXIII/1/--/2001 Tanggal 1 Januari 2001  
Kontrak Nomor : 021/LIT/BPPK-SDM/III/2001  
Ditjen Dikti, Depdiknas  
Nomor Urut : 31

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nopember, 2001



LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA  
TAHUN ANGGARAN 2001

**ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR DENGAN MEMAKAI PENDEKATAN SWP  
(SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN)**

3000233023141



Peneliti :

**Drs. Ec. BUSTANI BERACHIM  
NURUL ISTIFADAH, S.E.**

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh : Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia  
DIP Nomor : 059/XXIII/1/--/2001 Tanggal 1 Januari 2001  
Kontrak Nomor : 021/LIT/BPPK-SDM/III/2001  
Ditjen Dikti, Depdiknas  
Nomor Urut : 31

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

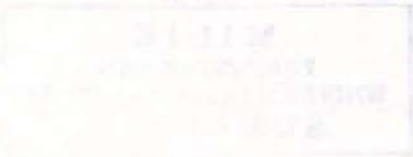
Nopember, 2001



LAPORAN PENELITIAN DOSEN BAHASA  
INDONESIA

ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI PRORINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR DENGAN MENAKA PENDIDIKAN SWP  
(SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN)

0000000000



Penulis :

Dr. B. BUSTANI BERACHIM  
NOMOR IDENTIFIKASI 201



LAPORAN PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Surabaya, 2011



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
**LEMBAGA PENELITIAN**

- |  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional         | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional             | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)      | 10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi                 |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga                   |  |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)   | 8. Puslit Bioenergi                   |  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066  
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA**

1.	a. Judul Penelitian :	ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DENGAN MEMAKAI PENDEKATAN SWP (SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN)
	b. Macam Penelitian :	II
2.	Kepala Proyek Penelitian	
	a. Nama :	Drs. Ec. Bustani Berachim
	b. Jenis Kelamin :	Laki-laki
	c. Pangkat/Gol/Nip :	IVa / 130 541 823
	d. Jabatan Fungsional :	--
	e. Fakultas/Jurusan :	Ekonomi Studi Pembangunan
	f. Universitas :	Airlangga
	g. Bidang Ilmu yg diteliti:	Ekonomi
3.	Jumlah Tim Peneliti :	2 orang
4.	Lokasi Penelitian :	Surabaya
5.	Jangka Waktu Penelitian :	5 bulan
6.	Biaya Yang Diperlukan :	Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi  
  
Drs. Ec. H Kariadi Mintaroem, M.S.  
NIP. 130 517 150

Surabaya, 12 September 2001

Ketua Peneliti

Drs. Ec. Bustani Berachim  
NIP. 130 541 823



Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian Unair

Prof. Dr. H. Sarmanto, M.S.  
NIP. 130 701 125



**RINGKASAN**

**ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DENGAN MEMAKAI PENDEKATAN SWP (SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN). (Bustani Berachim, Nurul Istifadah, 2001, 49 halaman)**

Penelitian ini dilakukan untuk mencoba menjawab permasalahan (1) sektor apa saja yang dominan memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Jawa Timur pada masing-masing SWP. (2) potensi apa yang dapat dikembangkan pada masing-masing SWP sehingga mampu memacu tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur umumnya dan khususnya untuk wilayah SWP yang bersangkutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah mencoba untuk melihat sektor yang dominan pada masing-masing SWP yang memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Jawa Timur. Juga untuk menganalisis potensi sektor yang dapat dikembangkan pada masing-masing SWP sehingga mampu memacu tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur umumnya dan khususnya untuk wilayah SWP yang bersangkutan.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang didasarkan pada data-data sekunder. Lokasi penelitian di sembilan SWP di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Sumber data sekunder diambil dari kantor Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur serta beberapa buku / literatur penunjang untuk memperkuat analisisnya.

Untuk menentukan sektor apa yang perlu dikembangkan di masing-masing SWP ditentukan dengan memakai pendekatan *Location Quotient* (LQ). Sektor yang mempunyai LQ yang lebih besar dari 1 adalah merupakan sektor basis, yaitu merupakan sektor dominan yang perlu dikembangkan sebagai *leading sector*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor-sektor yang perlu dikembangkan adalah berbeda-beda untuk masing-masing SWP. Namun demikian diperoleh hasil bahwa kondisi perekonomian di Jawa Timur secara umum sangat dipengaruhi oleh tiga sektor utama yaitu sektor pertanian; sektor industri pengolahan; serta sektor perdagangan, hotel & restoran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ternyata sektor pertanian masih mendominasi perekonomian di tiap SWP maupun perekonomian di Jawa Timur pada umumnya, sehingga pemerintah Jawa Timur hendaknya bersama-sama pemerintahan di Daerah Tingkat II perlu mempunyai “*good will*” untuk mengembangkan potensi di sektor pertanian ini. Sehingga dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi di Jawa Timur ini selain sektor industri dan sektor perdagangan, hotel & restoran yang memang mempunyai tingkat akselerasi pertumbuhan yang cepat maka perlu pula dipertimbangkan pengembangan di sektor pertanian.

Mengembangkan sektor industri yang kuat dengan ditopang kekuatan di sektor pertanian yang tangguh hendaknya tidak hanya slogan semata, tetapi perlu pula untuk diupayakan implementasinya sehingga Jawa Timur mampu untuk bertahan terhadap gejolak eksternal yang mungkin timbul seperti krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang baru lalu. Apabila pengembangan di sektor pertanian tidak dapat dilakukan secara ekstensifikasi maka usaha-usaha intensifikasi bidang pertanian perlu secara serius dikembangkan di Jawa Timur.

(Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga,  
No. Kontrak 021/LIT/BPPK-SDM/III/2001)

## SUMMARY

### THE ECONOMIC DEVELOPMENT ANALYSIS OF EAST JAVA PROVINCE WITH SWP APPROACH

Bustani Berachim and Nurul Istifadah  
Faculty of Economic, Airlangga University

The observation did to try find the problem's answer (1) whatever sector which dominant give biggest contribute to east java PDRB on each SWP. (2) What potential able to developed on each SWP so afford increase economic growth generally in east java and especially for the SWP area

The destination observation to see dominant sector which give biggest contribute to east java PDRB. This also to analysis potential sector that be able to developed on each SWP so afford increase economic growth generally in east java and especially for the SWP area

The observation has qualitatif descriptif character based on secondair datas. Observation location at nine SWP in east java province. Secondair datas source take from Badan Pusat Statistik office of east java province and books/literature to support analysis.

To determine choosing the sektor that necessary developed at each SWP decided use *Location Quotient* (LQ). The sector has LQ more than 1 is constitute based sector, that is constitute dominant sector necessary developed as leading sector.

Revenue of the observation indicate that sectors necessary to developed is diverge foreach SWP. Nevertheless obtained a yield that economic condition in east java generally influence by three main sector they are agriculture sector; manufacture industrial sector; and trading sector, hotel & restaurant. The other side apparently

known agriculture sector is still domination economic in each SWP inspite of generally in east java economic, so east java government with county necessary have "good will" for develop agriculture potential. To definitive grade successful economic foundation in east java besides industry sector and trading sector, hotel and restaurant which have growth accelerate than necessary to mull over agriculture sector development.

Development industry sector strongly with supporting by agriculture sector shouldn't catchword merely, however it has to effort implementation so east java afford withstand to external fluctation that possibly appear like economic crisis in 1997-1998. when agriculture development then intensive efforts in agriculture field has to developed in east java.

(Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga,  
No. Kontrak 021/LIT/BPPK-SDM/III/2001)



## KATA PENGANTAR

Syukur Alkhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan penelitian ini dapat disusun dan diselesaikan.

Atas dorongan dan bimbingan serta bantuan berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. DR. H. Sarmanu, M.S. selaku ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengerjakan penelitian ini .
2. Bapak-bapak & Ibu-ibu pegawai kantor Statistik Propinsi Jawa Timur yang telah membantu dalam menyediakan data yang sangat berguna dalam menyelesaikan penelitian ini
3. Serta pihak-pihak yang kami tidak bisa menyebutnya satu per satu yang telah langsung maupun tidak langsung membantu sehingga laporan penelitian ini dapat terwujud.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penulisan laporan penelitian ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu kami senantiasa membuka diri terhadap saran dan kritik membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan penelitian ini.

Semoga laporan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi diri kami khususnya dan pembaca umumnya.

Surabaya, September 2001

Penyusun

## DAFTAR ISI

	RINGKASAN .....	iii
	KATA PENGANTAR.....	v
	DAFTAR ISI.....	vi
	DAFTAR TABEL.....	viii
	DAFTAR LAMPIRAN .....	x
1	PENDAHULUAN .....	1
	1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
	1.2 Perumusan Masalah .....	5
2	TINJAUAN PUSTAKA .....	6
	2.1 Teori Basis Ekonomi .....	6
	2.2 Wilayah Pengaruh Ekonomi .....	12
	2.3 Teori PDB dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) .....	14
	2.4 Penelitian Sebelumnya .....	15
3	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	16
	3.1 Tujuan Penelitian .....	16
	3.2 Manfaat Penelitian .....	16
4	METODE PENELITIAN .....	17
	4.1 Pendekatan Penelitian .....	17
	4.2 Deskripsi Variabel .....	17
	4.3 Pengukuran Variabel .....	20
	4.4 Pengumpulan Data .....	20
	4.5 Analisis Data .....	21

5	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	22
5.1	Pembangunan Ekonomi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur .....	22
5.2	Daerah Satuan Wilayah Pembangunan .....	25
5.3	Perhitungan Location Quotients .....	31
6	SIMPULAN DAN SARAN .....	44
6.1	Simpulan .....	44
6.2	Saran – Saran .....	45
	DAFTAR PUSTAKA .....	46
	LAMPIRAN .....	47

**DAFTAR TABEL**

1.	<b>INFLASI DI INDONESIA DAN JAWA TIMUR ATAS DASAR TAHUN KALENDER 1990 – 2000 (%) .....</b>	<b>3</b>
2.	<b>PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR UTAMA DI JAWA TIMUR (MILYAR RP).....</b>	<b>3</b>
3.	<b>PDRB JAWA TIMUR ATAS DASAR HARGA BERLAKU, HARGA KONSTAN 1993, DAN PERTUMBUHANNYA, TAHUN 1990 – 2000 (JUTA RP) .....</b>	<b>23</b>
4.	<b>PDRB JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA, ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU (JUTA RP) TAHUN 1994 –1999 .....</b>	<b>24</b>
5.	<b>PDRB JAWA TIMUR MENURUT SWP DAN KABUPATEN ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU (JUTA RP), TAHUN 1990 – 1999 .....</b>	<b>29</b>
6.	<b>PDRB JAWA TIMUR MENURUT SWP DAN KABUPATEN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 (JUTA RP), TAHUN 1990 – 1999 .....</b>	<b>30</b>
7.	<b>PDRB JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA UNTUK SWP 1, ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU (JUTA RP), TAHUN 1994–1999.....</b>	<b>32</b>
8.	<b>PDRB JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA UNTUK SWP 2, ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU (JUTA RP), TAHUN 1994–1999.....</b>	<b>34</b>
9.	<b>PDRB JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA UNTUK SWP 3, ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU (JUTA RP), TAHUN 1994–1999.....</b>	<b>35</b>

10.	PDRB JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA UNTUK SWP 4, ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU (JUTA RP), TAHUN 1994–1999.....	37
11.	PDRB JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA UNTUK SWP 5, ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU (JUTA RP), TAHUN 1994–1999.....	38
12.	PDRB JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA UNTUK SWP 6, ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU (JUTA RP), TAHUN 1994–1999.....	39
13.	PDRB JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA UNTUK SWP 7, ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU (JUTA RP), TAHUN 1994–1999.....	41
14.	PDRB JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA UNTUK SWP 8, ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU (JUTA RP), TAHUN 1994–1999.....	42
15.	PDRB JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA UNTUK SWP 9, ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU (JUTA RP), TAHUN 1994–1999.....	43

## DAFTAR LAMPIRAN

1.	PERSONALIA PENELITIAN.....	47
2.	RIWAYAT HIDUP KETUA PENELITI.....	48
3.	RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	49

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan beberapa negara Asia belakangan ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak awal pertengahan tahun 1997 mengalami penurunan yang sangat tajam, yaitu 4,7% pada tahun 1997 menjadi minus 13,6% pada tahun 1998. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pun juga mengalami penurunan dari USD 1,088 pada tahun 1997 menjadi hanya USD 425.8 pada tahun 1998.

Seluruh sektor juga mengalami pertumbuhan yang negatif kecuali sektor pertanian. Sektor pertanian masih mengalami kenaikan walaupun sangat kecil, yaitu 0,26% karena dukungan dari subsektor perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Lemahnya fundamental ekonomi, yaitu rapuhnya struktur ekonomi dan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap valuta asing diduga menjadi penyebab merosotnya perekonomian Indonesia. Pada dasarnya struktur ekonomi yang lemah mencerminkan tidak seimbangannya pertumbuhan antar sektor dan tidak adanya interdependensi antar sektor.

Walaupun Indonesia adalah negara agraris dan kaya akan sumber daya alam, namun kontribusi output dari sektor pertanian dan kontribusinya terhadap pembentukan PDB relatif semakin kecil. Sedangkan sumbangan terhadap PDB dari sektor sekunder dan tersier mengalami peningkatan.

Akibat ketidakseimbangan pembangunan sektoral dan kurangnya keterkaitan sektor pertanian terhadap sektor sekunder dan tersier menjadikan sektor pertanian (sektor primer) tetap sebagai sektor ekonomi tradisional yang kurang berkembang. Disamping itu ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah (pembangunan regional) ikut memberikan andil dalam menjadikan fundamental ekonomi yang lemah.

Ada daerah yang pertumbuhannya ekonominya pesat tetapi ada pula daerah yang pertumbuhannya ekonominya sangat lambat.

Sebelum terjadinya krisis ekonomi, struktur ekonomi Jawa Timur pun mengalami fenomena yang sama. Sektor industri pengolahan tumbuh secara pesat dan memberi kontribusi terbesar dalam PDRB. Tetapi karena fundamental ekonomi yang kurang kuat sehingga sektor industri pengolahan yang semula mempunyai peranan yang besar ternyata justru mengalami penurunan. Penurunan di sektor industri pengolahan ini karena adanya beberapa faktor seperti, melemahnya daya serap masyarakat terhadap output industri akibat merosotnya pendapatan per kapita masyarakat serta dipicu oleh inflasi yang sangat tinggi.

Inflasi di Jawa Timur pada tahun 1998 mengalami peningkatan sampai lebih dari 10 kali lipat dibandingkan dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai 95,21%. Besarnya inflasi di Jawa Timur ini melebihi dari inflasi di tingkat nasional yang "hanya" 77,63% atau mengalami kenaikan 7 kali lipat dari tahun sebelumnya. Angka inflasi di Jawa Timur ini didalam teori ekonomi makro dikategorikan sebagai inflasi ganas/*galloping inflation* (Samuelson, 1998 : 581). Dalam *galloping inflation*, pasar keuangan menjadi tidak bergairah, perekonomian cenderung menimbulkan distorsi, investasi domestik menjadi lesu. Inflasi yang tinggi ini diakibatkan oleh meningkatnya biaya produksi akibat dari lemahnya struktur perindustrian dimana komponen bahan bakunya masih banyak yang menggunakan bahan baku impor yang sangat rentan terhadap turunnya nilai mata uang rupiah terhadap dollar.

Pada masa krisis, sektor pertanian merupakan sektor yang paling stabil dalam besaran produknya, sektor ini merupakan sektor yang paling tahan terhadap badai krisis. Namun demikian perkembangan harga produk pertanian kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan perkembangan produk di sektor industri pengolahan. Pada tahun 2000 inflasi di sektor industri lebih tinggi dibanding inflasi di sektor pertanian. Sehingga nilai tukar petani di Jawa Timur menjadi menurun, yang berarti menurunnya kesejahteraan / standar kehidupan petani Jawa Timur.



**TABEL 1**  
**INFLASI DI INDONESIA DAN JAWA TIMUR**  
**ATAS DASAR TAHUN KALENDER 1990 - 2000 (%)**

Tahun	Indonesia	Jawa Timur
1990	9,53	9,69
1991	9,52	9,97
1992	4,94	5,28
1993	9,77	10,19
1994	9,24	8,25
1995	8,64	8,69
1996	6,47	6,68
1997	11,05	9,11
1998	77,63	95,21
1999	2,01	0,24
2000	9,35	10,46

Sumber : Buletin Ringkas Juli 1992, Desember 1997, Maret 2001  
 Badan Pusat Statistik, disusun kembali

Gambaran perekonomian Jawa Timur dari tahun 1993 sampai tahun 2000 menurut sektor-sektor yang dominan dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini :

**TABEL 2**  
**PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR UTAMA**  
**DI JAWA TIMUR (MILYAR RP)**

Sektor	1993		1999		2000	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	49.172	100,00	151.730	100,00	169.935	100,00
1. Pertanian	9.670	19,67	34.026	22,43	36.203	21,30
2. Industri Pengolahan	12.383	25,18	41.158	27,13	45.860	26,99
3. Perdagangan, Hotel, & Restoran	10.018	20,37	35.799	23,59	41.405	24,37
4. Lainnya	17.101	34,78	40.747	26,85	46.467	27,34
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	49.172	100,00	55.038	100,00	56.793	100,00
1. Pertanian	9.670	19,67	10.004	18,18	10.112	17,81
2. Industri Pengolahan	12.383	25,18	15.064	27,37	15.380	27,08
3. Perdagangan, Hotel & Restoran	10.018	20,37	11.723	21,30	12.434	21,89
4. Lainnya	17.101	34,78	18.247	33,15	18.867	33,22
Pertumbuhan Ekonomi (%)			1,18		3,19	
1. Pertanian			1,66		1,08	
2. Industri Pengolahan			-0,26		2,10	
3. Perdagangan, Hotel & Restoran			3,11		6,07	
4. Lainnya					3,40	

Sumber : PDRB Jawa Timur, Triwulanan 1997-2000, Badan Pusat Statistik Jawa Timur dan BAPPEDA Propinsi Jawa Timur, disusun dan diolah kembali.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 1999 perekonomian Jawa Timur telah mulai terjadi recovery, karena angka pertumbuhannya telah mulai mengalami angka yang positif. Namun demikian sektor industri pengolahan yang paling terkena dampak krisis masih mengalami pertumbuhan yang negatif. Sektor pertanian yang paling tahan terhadap krisis ekonomi pertumbuhannya relatif stabil. Sedangkan sektor perdagangan, hotel & restoran mencapai angka pertumbuhan diatas pertumbuhan rata-rata Jawa Timur. Besarnya angka pertumbuhan masing-masing sektor ini perlu untuk diamati lebih lanjut sebagai upaya untuk mencari sektor andalan yang dapat dikembangkan dimasing-masing Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

Jawa Timur dengan kebijakan regionalisasinya membagi wilayahnya menurut Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) menjadi 9 SWP. Tujuan pembagian SWP ini diharapkan dapat lebih pemeratakan proses pembangunan dan hasil-hasilnya, disamping mengembangkan potensi yang ada di masing-masing daerah. Ada SWP yang wilayahnya merupakan daerah padat industri dan ada yang merupakan daerah dimana lebih mengandalkan pertumbuhannya pada sektor pertanian, serta sektor-sektor lainnya.

Perencanaan pembangunan dengan pendekatan SWP diharapkan dapat lebih pemeratakan pembangunan antar regional / daerah serta antar sektoral. Sehingga tidak terjadi persaingan pembangunan yang dapat merugikan berkembangnya daerah-daerah tersebut. Bahkan diharapkan antar daerah akan terjadi pembangunan yang saling melengkapi sehingga dapat mengefisienkan pembangunan yang dilaksanakan, karena adanya keterkaitan antar daerah.

Dengan menggunakan metode *Location Quotient (LQ)* dapat diketahui sektor mana yang paling dominan di setiap SWP sehingga dapat sebagai *leading sector* untuk memacu pertumbuhan di sektor-sektor yang lain (interdependensi antar sektor).

## **1.2 Perumusan Masalah**

**Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :**

- 1. Sektor apa saja yang dominan memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Jawa Timur pada masing-masing SWP;**
- 2. Potensi apa yang dapat dikembangkan pada masing-masing SWP sehingga mampu memacu tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur umumnya dan khususnya untuk wilayah SWP yang bersangkutan.**

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Basis Ekonomi

Beberapa teori yang dapat dipakai sebagai prasarana untuk dikembangkannya perangkat analisis ini adalah Teori Basis dan Non Basis Ekonomi. Perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor kegiatan, yaitu kegiatan basis (*basic activity*) dan kegiatan bukan basis (*non-basic activity*).

“Kegiatan basis (*basic activity*) adalah kegiatan yang mengekspor barang-barang dan jasa-jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, atau yang memasarkan barang-barang dan jasa-jasa mereka kepada orang-orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan bukan basis (*non-basic activity*) adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal didalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang-barang jadi; ruang lingkup produksi mereka dan daerah pasar mereka yang terutama adalah bersifat lokal”. (*John Glasson, 1990 : 63-64*)

Bertambah banyaknya basis didalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa didalamnya dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya, berkurangnya kegiatan basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan, dan turunnya permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis. Dengan demikian, sesuai dengan namanya, kegiatan basis mempunyai peranan penggerak pertama (*price mover role*) dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional.

Multiplier basis ekonomi biasanya dihitung menurut banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan atau pendapatan total dari sektor tersebut. Rumusan efek *employment multiplier* tersebut adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah total tenaga kerja dalam kegiatan-kegiatan basis dan bukan basis}}{\text{Jumlah total tenaga kerja dalam kegiatan-kegiatan basis}}$$

Multiplier ini dapat digunakan untuk memprediksi jumlah total kesempatan kerja dimasa yang akan datang. Hal ini dapat dijelaskan dengan menyelidiki akibat dari bertambahnya kesempatan kerja dalam industri basis akan menciptakan kesempatan kerja pula bagi kegiatan-kegiatan bukan basis.

Hampir semua studi basis ekonomi menggunakan *employment* (banyaknya pekerja) sebagai satuan ukuran. Hal ini memudahkan untuk penelitian karena data *employment* relatif lebih mudah diperoleh jika dibandingkan dengan data ekonomi lainnya. Namun *employment* sebagai satuan ukuran mempunyai keterbatasan-keterbatasan antara lain : bahwa tenaga kerja pada dua industri basis mempunyai tingkat upah yang berbeda, misalnya untuk teknologi usaha tani dan teknologi komputer dapat mempunyai efek multiplier yang sangat berbeda. Kelemahan lain adalah adanya tingkat produktivitas yang berbeda dan perubahan-perubahan produktivitas yang memungkinkan suatu perusahaan bertambah outputnya dan berakibat pada kenaikan upah dan pengeluaran tanpa harus menambah jumlah tenaga kerjanya.

Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan basis dan bukan basis adalah masalah yang sulit. Untuk perusahaan industri dan dagang dapat dibagi kedalam tiga kelompok : perusahaan basis, perusahaan bukan basis, dan perusahaan campuran. Matilla mengelompokkan perusahaan pesawat terbang sebagai perusahaan basis, dan perusahaan konstruksi sebagai perusahaan bukan basis, serta perusahaan grosir dan eceran sebagai kegiatan campuran. Dalam prakteknya perusahaan campuran ini sulit untuk dilakukan perhitungan. (*John Glasson, 1990 : 66*)

Pengalokasian perusahaan campuran kedalam kegiatan-kegiatan basis dan bukan basis dapat dilakukan dengan mengadakan survei langsung terhadap perusahaan-perusahaan individual atau secara tidak langsung melalui penggunaan informasi yang sudah tersedia seperti tingkat dan jenis pekerjaan pada masing-masing industri. Pendekatan ini mempunyai keterbatasan, selain menjemukan, membutuhkan waktu banyak, dan biaya yang tinggi.

Pendekatan secara tidak langsung mengenai pemisahan antara kegiatan basis dan kegiatan bukan basis dapat menggunakan salah satu ataupun gabungan dari tiga metode, yaitu :

1. Menggunakan asumsi-asumsi atau metode arbitrer sederhana yang mengasumsikan bahwa semua industri primer dan manufakturing (SIC 1-16) adalah basis, dan semua industri jasa (SIC 17-24) adalah bukan basis. Metode ini tidak memperhitungkan adanya kenyataan bahwa dalam sesuatu kelompok industri bisa terdapat industri atau industri-industri yang menghasilkan barang-barang yang sebagian diekspor atau dijual secara lokal maupun kedua-duanya.
2. Metode *location quotients* (LQ) di mana kuosien lokasi suatu industri di suatu daerah dapat dihitung dari rasio berikut :

$$LQ = \frac{\% \text{ tenaga kerja regional dari industri A}}{\% \text{ tenaga kerja nasional dari industri A}}$$

atau

$$LQ = \frac{\% \text{ pendapatan regional dari industri A}}{\% \text{ pendapatan nasional dari industri A}}$$

Dalam metode ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi dalam dua golongan, yaitu : (1) kegiatan ekonomi (industri) yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun pasar di luar daerah itu, industri ini disebut industri basic; (2) kegiatan ekonomi (industri) yang hanya melayani pasar di daerah itu sendiri, industri ini disebut industri non basic atau industri lokal.

Dasar penggunaan dari pada tehnik ini adalah teori *economic base* yang maknanya adalah sebagai berikut ; karena industri basic itu menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di daerah maupun untuk pasar di luar daerah yang

bersangkutan, maka penjualan hasil ke luar daerah itu mendatangkan arus pendapatan ke dalam daerah tersebut. Arus pendapatan ini menyebabkan baik kenaikan konsumsi maupun kenaikan investasi di daerah itu yang pada gilirannya dapat menaikkan pendapatan lagi dan kesempatan kerja. Jika di daerah itu terdapat pengangguran, maka kesempatan kerja yang baru itu dapat menampungnya, atau jika di daerah itu tidak terdapat pengangguran, maka daerah itu mempunyai daya tarik bagi orang-orang dari luar daerah yang mencari pekerjaan.

Kenaikan pendapatan di daerah itu tidak hanya menaikkan permintaan terhadap hasil industri basic melainkan juga akan menaikkan permintaan terhadap hasil industri lokal non basic, dan permintaan ini pada gilirannya akan menaikkan investasi di industri-industri tersebut terakhir. Dengan perkataan lain, penanaman modal di industri-industri lokal merupakan investasi yang *induced* sebagai akibat kenaikan pendapatan di industri-industri basic.

Berdasarkan gagasan ini, maka orang berpendapat bahwa industri-industri basic inilah yang patut dikembangkan di daerah. Yang pertama harus dilakukan ialah menggolongkan tiap industri dalam suatu daerah kedalam salah satu dari kedua golongan tersebut, dengan memakai *location quotient*. *Location quotient* ini mengukur konsentrasi dari pada sesuatu kegiatan atau industri di suatu daerah dengan jalan membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan/industri yang sama dalam perekonomian nasional.

Yang dipakai sebagai ukuran penggolongan tersebut dapat berlainan, dan dapat disesuaikan dengan keperluan. Umpamanya jika maksudnya ialah mencari industri atau kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya, maka yang dipakai sebagai dasar ukuran ialah jumlah karyawan. Kalau yang dianggap perlu adalah menaikkan pendapatan regional, maka pendapatan (*added value*) merupakan dasar ukuran yang tepat, sedang jika hasil produksi yang dipentingkan, maka jumlah hasil produksilah yang dipilih.

Secara umum *location quotient* ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  
(Kadariah, 1982 : 71-72)

$$\frac{v_i/v_t}{V_i/V_t} \quad \text{atau} \quad \frac{v_i/V_i}{v_t/V_t}$$

Jika	$v_i$	adalah pendapatan dari industri $i$ di suatu daerah
	$v_t$	adalah pendapatan total di daerah tersebut
	$V_i$	adalah pendapatan dari industri $i$ di seluruh negara
	$V_t$	adalah pendapatan total di seluruh negara

Dalam hal ini diadakan asumsi bahwa penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat nasional, dan juga bahwa permintaan daerah akan sesuatu barang pertama-tama dipenuhi dengan hasil daerah itu sendiri dan baru jika jumlah yang diminta melebihi jumlah produksi daerah itu, kekurangannya diimpor dari luar daerah.

Menurut Iwan Jaya Aziz, metode *location quotients* adalah : (Iwan Jaya Aziz; 1994)

“Cara lain untuk menganalisis perkembangan proses industrialisasi antar daerah adalah dengan mengamati perkembangan *location quotient* (LQ), yaitu suatu indikator sederhana yang menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah lain.”

Bila LQ lebih besar dari pada satu ( $LQ > 1$ ) berarti industri tersebut ‘kuat’ dan basis dan dapat mengekspor produksinya ke daerah lain. Hal ini dapat menunjukkan kegiatan ekspor atau basis, dan jumlah pekerja yang merupakan selisih dari jumlah yang diperlukan untuk mencapai  $LQ = 1$  ( yakni yang melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencapai swa-sembada regional) dianggap sebagai tenaga kerja yang melayani pasar ekspor. LQ kurang dari satu ( $LQ < 1$ ) berarti industri tersebut hanya mampu memasarkan produksinya di dalam daerah yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan kegiatan lokal atau bukan basis.



Kebaikan metode ini adalah dapat memperhitungkan penjualan barang-barang antara (industri batubara lokal yang menjual batubaranya kepada industri baja lokal akan digolongkan sebagai basis jika  $LQ > 1$ ); murah biayanya serta mudah diterapkan. Sedangkan kelemahannya adalah pada asumsi yang mendasarinya, yaitu keseragaman pola-pola permintaan regional dan nasional, tingkat konsumsi rata-rata untuk masing-masing barang sama di setiap daerah, dan keseragaman produktivitas regional menurut sektor industri.

3. Metode kebutuhan minimum (minimum requirements) adalah modifikasi dari metode LQ dengan menggunakan distribusi minimum dari employment yang diperlukan untuk menopang industri regional dan bukannya distribusi rata-rata. Untuk setiap daerah yang pertama-tama dihitung adalah persentase angkatan kerja regional yang dipekerjakan dalam setiap industri. Kemudian persentase-persentase itu diperbandingkan dengan memperhitungkan hal-hal yang bersifat kelainan, dan persentase terkecil dipergunakan sebagai ukuran kebutuhan minimum bagi industri tertentu. Persentase minimum ini dipergunakan sebagai batas dan semua employment di daerah-daerah lain yang lebih tinggi dari persentase ini dipandang sebagai employment basis. Proses ini dapat diulangi untuk setiap industri di daerah bersangkutan untuk memperoleh employment basis total. Dibanding dengan metode LQ, metode ini lebih bersifat arbitrer karena sangat tergantung pada pemilihan persentase minimum dan tingkat disagregasi -- disagregasi yang terlalu terperinci malahan dapat mengakibatkan hampir semua sektor menjadi kegiatan-kegiatan basis atau ekspor.

Teori basis adalah penggerak primer bagi perubahan regional dan bahwa pada setiap daerah terdapat suatu rasio *employment* basis/bukan basis tertentu yang tetap konstan walaupun struktur perekonomian daerah yang bersangkutan sudah berubah. Walaupun industri basis merupakan suatu faktor penting yang mendorong perubahan dalam perekonomian regional, namun tidak perlu diragukan bahwa dalam keadaan tertentu kegiatan-kegiatan bukan basis yang sudah berkembang dengan baik dapat menarik masuknya industri basis kedalam sesuatu daerah dan dengan demikian dapat

menjadi salah satu penentu bagi tingkat kegiatan ekonomi daerah tersebut. Juga sangat mungkin perubahan basis/bukan basispun mengalami perubahan bersama-sama dengan pertumbuhan atau kemunduran yang diperkirakan akan terjadi dimana unsur bukan basis menjadi relatif lebih penting sepanjang waktu.

Karena terpusat pada kegiatan basis atau ekspor maka teori basispun menutup mata terhadap pentingnya impor. Bertambahnya employment basis dan pendapatan mungkin hanya mempunyai efek multiplier yang sangat terbatas terhadap kegiatan basis jika sebagian besar dari kenaikan pendapatan itu mengalir keluar dari daerah yang bersangkutan dalam bentuk pengeluaran untuk impor. Tetapi harus dicatat bahwa pengaruh dari faktor perdagangan tidak selalu bersifat negatif, mengingat bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian regional, suatu titik dapat tercapai dimana daerah tersebut dapat menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak mengimpornya lagi. (*Jacobs J, 1969 dalam John Glasson, 1990 : 69*)

Jadi, bahwa pertumbuhan suatu perekonomian tidak hanya disebabkan karena bertambahnya ekspor dari industri-industri basis tetapi juga dengan jalan mengganti barang-barang impor dengan barang-barang hasil produksi daerah yang bersangkutan.

## 2.2 Wilayah Pengaruh Ekonomi

Perwilayahan mengandung makna membagi-bagi suatu wilayah yang lebih luas (misalnya wilayah negara, wilayah propinsi) menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil, serta juga mengandung arti mengelompokkan beberapa wilayah yang kecil-kecil menjadi satu kesatuan wilayah, misalnya beberapa wilayah kabupaten dijadikan suatu wilayah pengembangan dalam satu provinsi.

Suatu sistem perwilayahan dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan perwilayahan itu sendiri, misalnya bersifat administrasi, kesamaan kondisi, lingkup pengaruh ekonomi dan kesatuan perencanaan. (*Budi D Sinulingga, 1999 : 21*)



Perwilayahan berdasar administrasi berkaitan erat dengan sistem pemerintahan suatu negara, misalnya berdasar UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

Wilayah pengaruh ekonomi terdiri dari satuan-satuan yang heterogen seperti kota besar, kota sedang, kota kecil dan pedesaan, maupu kawasan yang homogen yang berkaitan dan bergantung satu sama lain. Kota dalam wilayah ini dikenal sebagai pusat kegiatan atau pusat pertumbuhan yang mempunyai wilayah pengaruh masing-masing.

Dr. Ir. Purnomosidi Hajisarosa menamakan wilayah ini sebagai Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), dari hasil penelitiannya yang didasarkan pada studi aliran barang (1977) dapat disimpulkannya bahwa di Indonesia ada 70 satuan wilayah pengembangan dan dapat diyakini bahwa sekarang ini akan berbeda, karena sistem jaringan transportasi telah berkembang yang mengakibatkan perubahan aliran barang. (Budi D Sinulingga, 1999 : 23)

Struktur tata ruang wilayah pengaruh ekonomi ini secara garis besar dibagi dalam tiga elemen, yaitu : (Glasson, John, 1978, hal 148 dalam Budi D Sinulingga, 1999 : 25)

- a. Kumpulan dari industri tersier (pelayanan jasa) yang condong berkumpul di satu tempat dan membentuk sistem tempat sentral yang tersebar secara merata dalam wilayah tersebut.
- b. Kumpulan dari industri sekunder (manufaktur) yang tersebar tidak merata, yang condong untuk mengadakan aglomerasi. Kumpulan industri ini akan memperbesar tempat sentral apabila berlokasi pada tempat sentral tersebut, sehingga tempat sentral berubah menjadi kota yang semakin besar.
- c. Jaringan transportasi yang menghubungkan tempat-tempat a dan b seperti jalan raya dan jalan kereta api.

Satu faktor / elemen lain yang mempengaruhi adalah sungai-sungai.

### 2.3 Teori PDB dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) suatu periode tertentu sebenarnya merupakan hasil perkalian antara harga barang yang diproduksi dengan jumlah barang yang dihasilkan. (Prathama Rahardja & Mandala Manurung, 2001 : 40)

Perhitungan PDB dengan menggunakan harga berlaku dapat memberi hasil yang menyesatkan, karena pengaruh inflasi. Untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat, maka perhitungan PDB sering menggunakan perhitungan berdasarkan harga konstan. Yang dimaksud dengan harga konstan adalah harga yang dianggap tidak berubah. Untuk memperoleh PDB harga konstan, kita harus menentukan tahun dasar (*based year*), yang merupakan tahun dimana perekonomian berada dalam kondisi baik/stabil. Harga barang pada tahun tersebut kita gunakan sebagai harga konstan.

Perhitungan PDB akan memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara, dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk. Angka yang diperoleh adalah PDB per kapita. Kelemahan dari perhitungan ini adalah tidak diperhatikannya aspek distribusi pendapatan.

Perhitungan PDB maupun PDB per kapita juga dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Ada hubungan yang positif antara tingkat PDB perkapita dengan tingkat kesejahteraan sosial. Makin tinggi PDB per kapita, tingkat kesejahteraan sosial makin membaik. Jika PDB per kapita makin tinggi maka daya beli masyarakat, kesempatan kerja serta masa depan perekonomian makin membaik. (Prathama Rahardja & Mandala Manurung, 2001 : 45).

Untuk konsep PDRB hampir sama dengan konsep dan penjelasan pada PDB diatas, hanya saja lingkup pembahasan PDRB adalah untuk tingkat daerah. Untuk lingkup daerah tingkat I dipakai PDRB Daerah Tingkat I, sedang untuk lingkup daerah tingkat II dipakai PDRB Daerah Tingkat II.

## 2.4 Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai Analisa Pembangunan Ekonomi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dengan Memakai Pendekatan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) telah dilakukan oleh saudari Endah Sri Wahyuni, Juli Winarni, dan Ermila B.K. pada tahun 1999, namun demikian yang dianalisa adalah hanya pada SWP VII saja dengan memakai pendekatan *shift-share analysis*. Sedangkan dalam penelitian kali ini dipakai pendekatan *location quotient (LQ)* dan meliputi sembilan SWP di Jawa Timur.

Dalam kesimpulan penelitiannya dikemukakan bahwa sektor-sektor ekonomi daerah SWP VII mempunyai sumbangan secara rata-rata dan dapat diklasifikasikan agak kuat terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, terutama untuk sektor-sektor pertambangan & penggalian, sektor listrik gas & air bersih, sektor perdagangan hotel & restoran, serta sektor pengangkutan & komunikasi.

## **BAB 3**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **3.1 Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk melihat sektor yang dominan pada masing-masing SWP yang memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis potensi sektor yang dapat dikembangkan pada masing-masing SWP sehingga mampu memacu tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur umumnya dan khususnya untuk wilayah SWP yang bersangkutan.

#### **3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dari penelitian ini dapat diketahui sektor apa saja dari masing-masing SWP yang patut dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki di seluruh Daerah Tingkat I Jawa Timur.
2. Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan lebih lanjut terutama untuk penentu kebijakan di wilayah daerah Tingkat I Jawa Timur, khususnya untuk masing-masing SWP.
3. Dapat digunakan untuk bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut.

## **BAB 4**

### **METODE PENELITIAN**

#### **4.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mempelajari tentang sektor-sektor perekonomian yang ada di sembilan SWP di Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dari kesembilan SWP di Jawa Timur tersebut kemudian dilakukan penelitian untuk melihat sektor apakah yang paling dominan di masing-masing SWP dengan metode *Location Quotient* (LQ). Dengan diketahuinya sektor yang paling dominan di masing-masing SWP di Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut maka dengan memacu sektor potensial tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap SWP dapat meningkat dan kemudian diharapkan akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur secara keseluruhan.

#### **4.2 Deskripsi Variabel**

Sembilan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur meliputi :

1. Satuan Wilayah Pembangunan I dengan pusat di Kotamadya Surabaya
  - a. Kabupaten Sidoarjo
  - b. Kabupaten Mojokerto
  - c. Kabupaten Lamongan
  - d. Kabupaten Gresik
  - e. Kabupaten Bangkalan
  - f. Kotamadya Mojokerto
  - g. Kotamadya Surabaya

2. Satuan Wilayah Pembangunan 2 dengan pusat di Kabupaten Sumenep
  - a. Kabupaten Sampang
  - b. Kabupaten Pamekasan
  - c. Kabupaten Sumenep
3. Satuan Wilayah Pembangunan 3  
Kabupaten Banyuwangi
4. Satuan Wilayah Pembangunan 4 dengan pusat di Kabupaten Jember
  - a. Kabupaten Jember
  - b. Kabupaten Bondowoso
  - c. Kabupaten Situbondo
5. Satuan Wilayah Pembangunan 5 dengan pusat di Kotamadya Probolinggo
  - a. Kabupaten Lumajang
  - b. Kabupaten Probolinggo
  - c. Kotamadya Probolinggo
6. Satuan Wilayah Pembangunan 6 dengan pusat di Kotamadya Malang
  - a. Kabupaten Malang
  - b. Kabupaten Pasuruan
  - c. Kotamadya Malang
  - d. Kotamadya Pasuruan
7. Satuan Wilayah Pembangunan 7 dengan pusat di Kotamadya Kediri
  - a. Kabupaten Trenggalek
  - b. Kabupaten Tulungagung
  - c. Kabupaten Blitar
  - d. Kabupaten Kediri
  - e. Kabupaten Jombang
  - f. Kabupaten Nganjuk
  - g. Kotamadya Kediri
  - h. Kotamadya Blitar



8. Satuan Wilayah Pembangunan 8 dengan pusat di Kotamadya Madiun
  - a. Kabupaten Pacitan
  - b. Kabupaten Ponorogo
  - c. Kabupaten Madiun
  - d. Kabupaten Magetan
  - e. Kabupaten Ngawi
  - f. Kotamadya Madiun
9. Satuan Wilayah Pembangunan 9 dengan pusat di Kabupaten Tuban
  - a. Kabupaten Bojonegoro
  - b. Kabupaten Tuban

Sedangkan sembilan sektor perekonomian yang diamati meliputi :

- Sektor Primer
  1. sektor Pertanian
  2. sektor Pertambangan dan Penggalian
- Sektor Sekunder
  3. sektor Industri Pengolahan
  4. sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih
  5. sektor Konstruksi
- Sektor Tersier
  6. sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
  7. sektor Pengangkutan dan Komunikasi
  8. sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
  9. sektor Jasa-Jasa

### 4.3 Pengukuran Variabel

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive sampling* di sembilan SWP Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Dasar penelitian ini adalah sembilan sektor di seluruh SWP di Jawa Timur dengan pendekatan *metode Location Quotients (LQ)*. Pada tiap-tiap SWP tersebut dihitung besarnya LQ berdasarkan nilai pendapatan sektornya. Dari hasil perhitungan akan dapat diketahui sektor dominan / sektor basis pada masing-masing SWP, yaitu sektor-sektor yang mempunyai nilai LQ lebih besar dari satu. Sektor inilah yang merupakan *leading sector* yang dianggap dapat memberikan andil dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing SWP dan untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada umumnya.

### 4.4 Pengumpulan Data

Data yang dipakai adalah data sekunder yang diambil dari Kantor Statistik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Apabila dirasa perlu maka data sekunder diambil dari Kantor Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II yang dimaksud dalam masing-masing SWP di wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dari data yang diperoleh kemudian ditabulasikan dan diolah lebih lanjut sesuai dengan metode statistika dan matematika yang disesuaikan dengan pengukuran variabel seperti dalam petunjuk teori dalam bab tinjauan pustaka.

#### 4.5 Analisis Data

Tehnik analisa dengan menggunakan pendekatan *Location Quotients (LQ)* yaitu bahwa perhitungannya didasarkan pada perhitungan nilai tambah sektor “x” yang diamati di SWP yang dimaksud, dibandingkan dengan total nilai tambah sektoral pada SWP tersebut (% nilai tambah regional SWP terhadap industri “x”), kemudian hasilnya dibagi dengan perbandingan nilai tambah sektor “x” di Jawa Timur dibandingkan dengan total PDRB Jawa Timur atau total nilai tambah sektoral secara regional Jawa Timur (% nilai tambah regional Jawa Timur terhadap industri “x”).

Adapun rumusan perhitungan LQ adalah sebagai berikut :

$$LQ = \frac{\% \text{ pendapatan regional dari industri A}}{\% \text{ pendapatan nasional dari industri A}}$$

Bila LQ lebih besar dari pada satu ( $LQ > 1$ ) berarti industri tersebut ‘kuat’ dan merupakan industri basis yang dapat mengekspor produksinya ke daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekspor atau basis. Untuk sektor basis ini dapat dianggap sebagai leading sector, sehingga perlu untuk dikembangkan menjadi motor pertumbuhan pada SWP tersebut.

Bila LQ kurang dari satu ( $LQ < 1$ ) berarti industri tersebut hanya mampu memasarkan produksinya di dalam daerah yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan kegiatan lokal atau bukan basis.

## **BAB 5**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berbagai daerah tentu mempunyai keadaan dan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang relatif makmur dan ada yang kurang beruntung. Sebagai faktor dasar yang membedakannya adalah struktur perekonomian daerah yang bersangkutan. Sehingga analisa mengenai struktur perekonomian ini menjadi sangat penting dalam melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Salah satu indikator untuk mengukur kondisi perkembangan ekonomi adalah dengan melihat perkembangan angka PDB rielnnya, dan untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah adalah dengan perkembangan PDRB riel. Sehingga untuk mengamati perkembangan ekonomi Jawa Timur ini, maka diamati besaran PDRB nya, baik secara nominal / atas dasar harga yang berlaku dan PDRB secara riel.

#### **5.1 Pembangunan Ekonomi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur**

Untuk Daerah Tingkat I Jawa Timur, terlihat bahwa angka pertumbuhan PDRB nominal selama dasa warsa 1993 – 1999 adalah 20,66%, namun demikian pertumbuhan PDRB secara riel hanya meningkat 1.90%. Pada masa awal krisis periode tahun 1997 - 1998 PDRB secara nominal mengalami kenaikan yang sangat besar, yaitu 52,92%. Namun demikian pertumbuhan PDRB secara riel justru memperlihatkan penurunan yang cukup tajam, sebesar -16,12%. Hal ini dapat terjadi karena besaran nominal PDRB atas dasar harga berlaku (secara nominal) dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga, dimana pada tahun 1998 mengalami inflasi sampai hampir sepuluh kali lipat dari masa sebelum krisis ekonomi tahun 1997. Angka inflasi di Jawa Timur pada tahun 1998 sebesar 95,21%. Angka inflasi ini melampaui dari tingkat inflasi nasional yang “hanya” 77,63%. Lihat kembali Tabel 1.

TABEL 3  
PDRB JAWA TIMUR ATAS DASAR HARGA BERLAKU,  
HARGA KONSTAN TAHUN 1993, DAN PERTUMBUHANNYA  
TAHUN 1990 – 2000 (JUTA RP)

TAHUN	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993
1990*)	29.123.204,42	16.732.492,12
1991*)	34.072.027,90	17.924.005,03
1992*)	38.566.652,54	19.183.887,14
1993	49.172.247,51	49.172.247,51
1994	57.146.473,43	52.727.480,71
1995	65.883.192,58	57.040.503,98
1996	76.566.556,71	61.752.469,06
1997	88.772.382,72	64.853.575,89
1998	135.753.196,98	54.398896,74
1999	151.729.956,19	55.038.126,60
2000**)	169.934.638,24	56.793.405,28
Pertumbuhan (%)		
1990-2000	19,29	13,00
1993-1999	20,66	1,90
1997-1998	52,92	-16,12

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur dan BAPPEDA Propinsi Jawa Timur, disusun dan diolah kembali.

\*) atas dasar harga konstan 199983

\*\*\*) angka sangat sementara

Pembangunan ekonomi di Jawa Timur dalam kurun waktu satu dasa warsa terakhir secara nominal mengalami peningkatan yang cukup pesat di semua sektor perekonomian. Perkembangan PDRB sektoral di Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini. Pada tabel tersebut menunjukkan perkembangan sektor perekonomian selama tahun 1994 sampai 1999. Sektor yang memberi kontribusi terbesar di Propinsi Jawa Timur adalah sektor pertanian; sektor industri pengolahan/manufaktur; sektor perdagangan, hotel & restoran; serta sektor jasa-jasa.



**TABEL 4**  
**PDRB JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA**  
**ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU (JUTA RP)**  
**TAHUN 1994 - 1999**

Sektor	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Pertumbuhan (%) 1994-1999
1 Pertanian	10,302,357.80	11,090,987.81	12,845,396.64	15,512,558.28	28,832,429.04	33,185,749.86	26.36
2 Permbangn&Penggalian	1,041,535.49	1,206,883.97	943,026.40	1,332,138.65	1,259,912.37	1,579,246.62	8.68
3 Industri Pengolahan	15,586,765.34	18,718,451.52	22,097,863.29	22,207,743.53	33,184,867.10	35,589,256.59	17.94
4 Listrik,Gas&Air Bersih	887,850.54	1,206,111.85	1,877,128.01	1,387,329.71	1,748,325.20	2,306,171.16	21.03
5 Konstruksi	3,777,121.40	4,442,628.44	5,196,020.53	5,443,586.97	6,712,503.83	6,916,434.76	12.86
6 Perdagangan,Hotel&Rest.	11,857,892.57	13,853,687.07	15,975,480.55	17,209,477.30	29,018,821.38	32,099,054.69	22.04
7 Pengangkutan&Komunikasi	3,611,594.51	4,092,441.08	4,977,378.10	4,949,082.44	7,673,403.43	8,428,131.18	18.48
8 Keuangan Persewaan dll	3,843,788.95	4,381,519.39	4,991,241.11	5,182,376.61	5,435,827.38	5,637,503.94	7.96
9 Jasa - Jasa	6,237,655.04	6,935,822.59	7,735,022.22	8,396,433.66	11,528,924.64	13,421,666.77	16.56
<b>Total PDRB</b>	<b>57,146,581.64</b>	<b>65,928,533.72</b>	<b>76,638,556.85</b>	<b>81,620,707.15</b>	<b>125,394,814.17</b>	<b>139,141,215.57</b>	<b>19.48</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur dan BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur, disusun dan diolah kembali.

Kontribusi sektor industri pengolahan secara nominal selalu mendominasi angka PDRB Jawa Timur, namun demikian angka pertumbuhan sektoralnya yang terbesar adalah untuk sektor pertanian. Angka pertumbuhan ekonomi sektor pertanian periode tahun 1994 – 1999 adalah 26,36%, sedangkan untuk sektor industri pengolahan 17,94%. Sektor kedua yang memberi kontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Timur adalah sektor perdagangan, hotel & restoran. Pertumbuhan ekonomi sektor ini selama periode tahun 1994 – 1999 adalah 22,04%. Kemudian sektor pertanian dan sektor jasa-jasa menempati urutan ketiga dan keempat sebagai kontributor sektoral terbesar perekonomian Jawa Timur.

Pada masa krisis, tahun 1997 - 1998, dari keempat kontributor sektoral terbesar tersebut sektor pertanian terbukti yang paling tahan terhadap badai krisis, bahkan secara nominal mengalami peningkatan sebesar 85,87%. Pada periode tahun 1997 - 1999 sektor pertanian ini mengalami peningkatan lebih dari 100%.

Sektor lain yang mempunyai kecenderungan mengalami pertumbuhan yang semakin meningkat adalah sektor jasa-jasa. Angka pertumbuhannya untuk periode tahun 1994 – 1999 adalah 16,56%.

Dalam perkembangan pola perubahan struktur ekonomi Jawa Timur, diharapkan sektor tersier mampu meningkat secara signifikan. Sektor tersier dimaksud meliputi sektor perdagangan, hotel & restoran; sektor pengangkutan & komunikasi; sektor keuangan, persewaan, & jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Untuk sektor

tersier ini terlihat pada struktur ekonomi Jawa Timur, sektor tersier ini terutama untuk sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan tidak menunjukkan peningkatan yang berarti, bahkan mempunyai angka pertumbuhan yang paling kecil, yaitu sebesar 7.96%.

Namun demikian secara keseluruhan yang tercermin dalam angka PDRB Jawa Timur tersebut adalah bahwa perekonomian Jawa Timur pasca krisis ekonomi, terlihat mulai bangkit dari keterpurukan dan berusaha untuk melakukan recovery perekonomian. Tahun 1999 sedikit mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 1.18%, setelah sebelumnya secara riil mengalami penurunan. Tahun 2000 bahkan telah meningkat menjadi 3,19%. Hal ini ditopang oleh sektor perdagangan, hotel & restoran. Sektor yang paling terkena dampak krisis ekonomi adalah sektor industri pengolahan. Sehingga perlu kiranya untuk memperkuat fondasi ekonomi terutama untuk sektor industri pengolahan.

Yang perlu diamati dan diwaspadai dalam situasi ekonomi di Jawa Timur adalah masih sedikit rentan terhadap segala kemungkinan ketidakpastian, terutama untuk subsektor perbankan. Sektor ini mempunyai keterkaitan yang cukup kuat terhadap sektor ekonomi lainnya, terutama sektor industri dan konstruksi. Subsektor perbankan pada tahun 1999 masih mengalami kontraksi yang cukup serius sehubungan dengan belum berhasilnya program restrukturisasi perbankan.

## **5.2 Daerah Satuan Wilayah Pembangunan**

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur membagi daerah perencanaannya menjadi 9 Satuan Wilayah Pembangunan (SWP). Kesembilan SWP tersebut meliputi :

1. Satuan Wilayah Pembangunan I dengan pusat di Kotamadya Surabaya
  - a. Kabupaten Sidoarjo
  - b. Kabupaten Mojokerto
  - c. Kabupaten Lamongan

- d. Kabupaten Gresik
  - e. Kabupaten Bangkalan
  - f. Kotamadya Mojokerto
  - g. Kotamadya Surabaya
2. Satuan Wilayah Pembangunan 2 dengan pusat di Kabupaten Sumenep
- a. Kabupaten Sampang
  - b. Kabupaten Pamekasan
  - c. Kabupaten Sumenep
3. Satuan Wilayah Pembangunan 3  
Kabupaten Banyuwangi
4. Satuan Wilayah Pembangunan 4 dengan pusat di Kabupaten Jember
- a. Kabupaten Jember
  - b. Kabupaten Bondowoso
  - c. Kabupaten Situbondo
5. Satuan Wilayah Pembangunan 5 dengan pusat di Kabupaten Probolinggo
- a. Kabupaten Lumajang
  - b. Kabupaten Probolinggo
  - c. Kotamadya Probolinggo
6. Satuan Wilayah Pembangunan 6 dengan pusat di Kotamadya Malang
- a. Kabupaten Malang
  - b. Kabupaten Pasuruan
  - c. Kotamadya Malang
  - d. Kotamadya Pasuruan
7. Satuan Wilayah Pembangunan 7 dengan pusat di Kotamadya Kediri
- a. Kabupaten Trenggalek
  - b. Kabupaten Tulungagung
  - c. Kabupaten Blitar
  - d. Kabupaten Kediri
  - e. Kabupaten Jombang
  - f. Kabupaten Nganjuk



- g. Kotamadya Kediri
- h. Kotamadya Blitar
- 8. Satuan Wilayah Pembangunan 8 dengan pusat di Kotamadya Madiun
  - a. Kabupaten Pacitan
  - b. Kabupaten Ponorogo
  - c. Kabupaten Madiun
  - d. Kabupaten Magetan
  - e. Kabupaten Ngawi
  - f. Kotamadya Madiun
- 9. Satuan Wilayah Pembangunan 9 dengan pusat di Kabupaten Tuban
  - a. Kabupaten Bojonegoro
  - b. Kabupaten Tuban

Pada Tabel 5 terlihat angka PDRB untuk tiap Satuan Wilayah Pembangunan (SWP). PDRB SWP 1 yang meliputi wilayah *Gerbangkertasusila* mempunyai andil terbesar dalam pembentukan nilai PDRB Jawa Timur secara keseluruhan. Hal ini karena pada SWP 1 termasuk didalamnya adalah ibukota propinsi, yaitu Kotamadya Surabaya. Kotamadya Surabaya sebagai pusat kegiatan di SWP 1 mempunyai aktivitas ekonomi yang secara kuantitatif dan kualitatif terbesar diantara kabupaten/kotamadya lain.

PDRB SWP 7 menempati urutan kedua sebagai penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB Jawa Timur. Besarnya PDRB pada SWP 7 terbesar adalah diberikan oleh Kotamadya Kediri. Hal ini disebabkan di Kotamadya Kediri terdapat pabrik rokok terbesar di Indonesia, yaitu PT. Gudang Garam. Bahkan Kotamadya Kediri merupakan kontributor terbesar kedua terhadap PDRB Jawa Timur untuk daerah tingkat II setelah Kotamadya Surabaya. Kemudian disusul oleh Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Di wilayah kedua kabupaten Sidoarjo dan Gresik ini terdapat banyak pabrik, dan merupakan kota *hinterland* dari pusat kota Jawa Timur yaitu Kotamadya Surabaya.

Apabila diamati dari perkembangannya, terlihat bahwa pada masa krisis, tahun 1997 – 1998, besarnya PDRB SWP 1 terlihat lebih terpengaruh dibandingkan dengan PDRB SWP 7. Hal ini disebabkan karena pada SWP 1, yang berkembang adalah industri pengolahan yang bahan bakunya banyak berasal dari komponen impor. Sedangkan pada SWP 7, sektor industri yang dominan adalah yang mempunyai kemampuan ekspor, seperti pabrik rokok P.T. Gudang Garam, sehingga hal ini justru diuntungkan oleh krisis ekonomi yang baru lalu dimana terjadi depresiasi nilai rupiah terhadap USD yang mengakibatkan penerimaan rupiah dari nilai ekspornya menjadi tinggi. Angka pertumbuhan PDRB secara nominal yang dapat dicapai pada masa krisis untuk SWP 7 masih cukup besar, yaitu 69,29%, dimana khusus untuk wilayah Kotamadya Kediri mencapai 80,37%. Sedangkan angka pertumbuhan PDRB untuk SWP 1 sebesar 40,81% dan khusus untuk Kotamadya Surabaya angka pertumbuhannya adalah 36,59%.

Namun demikian perhitungan secara riil angka pertumbuhan PDRB Jawa Timur ini apabila dilihat menurut kelompok SWP maupun menurut daerah kabupaten/kotamadya, pada masa krisis tahun 1997 - 1998 semuanya mengalami angka pertumbuhan PDRB yang negatif atau mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh daerah di Jawa Timur, tidak terkecuali, semuanya terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia secara nasional. Namun demikian setelah tahun 1999 semua daerah kabupaten / kotamadya mampu meningkatkan angka pertumbuhan ekonominya secara perlahan-lahan. Hal ini terlihat dari angka pertumbuhan PDRB riilnya pada tahun 1998 – 1999 yang kesemuanya sudah menunjukkan angka kenaikan yang positif walaupun di beberapa daerah masih menunjukkan angka pertumbuhan yang relatif kecil. Lihat Tabel 6.





### 5.3 Perhitungan Location Quotients

Sektor-sektor yang mempunyai kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB di SWP 1 adalah sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel & restoran; sektor pertanian; sektor konstruksi; sektor pengangkutan & komunikasi; sektor keuangan; persewaan & jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa.

Dari perhitungan LQ pada SWP 1, ada beberapa sektor yang mempunyai nilai LQ dibawah 1, yaitu sektor pertanian; sektor pertambangan & penggalian; dan sektor jasa-jasa. Sektor pertambangan & penggalian menunjukkan nilai LQ yang semakin menurun, artinya adalah bahwa peran sektor ini di SWP 1 terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur semakin menurun.

Demikian juga untuk sektor pertanian, walaupun kontribusi nominalnya dalam pembentukan PDRB di SWP 1 semakin besar, tetapi perannya terhadap perekonomian cenderung semakin menurun. Hal ini ditunjukkan dengan nilai LQ-nya yang jauh dibawah angka 1. Sedangkan sektor jasa-jasa, walaupun mempunyai nilai  $LQ < 1$ , namun mempunyai kecenderungan yang meningkat sehingga patut untuk diperhatikan. Secara keseluruhan, sektor yang dominan untuk diperhatikan pada SWP 1 adalah semua sektór, kecuali sektor pertanian; sektor pertambangan & penggalian; serta sektor jasa-jasa. Lihat Tabel 7.

Pada SWP 2, sektor-sektor yang mempunyai kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB di SWP 2 adalah sektor pertanian; dan sektor perdagangan, hotel & restoran. Sektor jasa-jasa menunjukkan kecenderungan peran yang semakin besar. Demikian pula untuk sektor pertambangan & galian, menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang sangat pesat. Kontribusinya terhadap PDRB di SWP 2 memang tidak menunjukkan angka yang relatif besar, namun demikian cenderung mengalami kenaikan pertumbuhannya yang relatif sangat besar. Bahkan untuk sektor ini perannya terhadap perekonomian Jawa Timur menunjukkan besaran yang sangat luar biasa. LQ sektor pertambangan & galian pada tahun 1988 adalah 10,023 dan pada tahun 1999 mencapai 10,622.

TABEL 7  
 PDRB JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA UNTUK SWP 1  
 ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU (JUTA RP)  
 TAHUN 1994 - 1999

Sektor	Tahun 1994		Tahun 1995		Tahun 1996		Tahun 1997		Tahun 1998		Tahun 1999	
	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ
1 Pertanian	1,765,722.33	0.409	1,925,481.16	0.408	2,106,067.02	0.389	2,336,687.19	0.403	4,456,223.93	0.452	4,487,798.73	0.403
2 Pertmbangn&Penggalian	468,970.41	1.074	530,619.99	1.034	158,390.16	0.398	510,637.35	1.025	294,598.58	0.684	317,408.22	0.588
3 Industri Pengolahan	8,238,687.82	1.260	9,842,793.94	1.237	11,690,738.56	1.254	10,301,092.68	1.240	13,307,790.70	1.173	14,219,764.30	1.190
4 Listrik, Gas&Air Bersih	596,242.74	1.601	811,542.15	1.583	947,548.28	1.197	840,040.38	1.619	1,075,791.73	1.800	1,470,932.68	1.899
5 Konstruksi	2,016,929.96	1.273	2,378,926.84	1.260	2,797,311.92	1.276	2,726,248.35	1.339	3,297,246.69	1.437	3,386,123.84	1.457
6 Perdgngan, Hotel&Rest.	5,490,212.40	1.104	6,467,568.07	1.098	7,526,270.31	1.117	7,091,034.78	1.102	11,759,421.38	1.186	13,121,076.89	1.217
7 Pengangkdn&Komunikasi	1,834,708.85	1.211	2,077,305.45	1.194	2,511,734.74	1.196	2,250,758.86	1.216	3,608,504.98	1.376	4,085,168.06	1.443
8 Keuangan, Persewaan dll	1,788,685.27	1.110	2,042,193.84	1.096	2,353,000.37	1.118	2,282,873.59	1.178	2,106,620.96	1.134	2,179,083.43	1.151
9 Jasa - Jasa	1,767,031.23	0.675	1,952,946.90	0.662	2,235,777.37	0.685	2,191,843.90	0.698	2,955,771.26	0.750	3,470,391.27	0.770
<b>PDRB SWP 1</b>	<b>23,967,191.01</b>		<b>28,029,378.34</b>		<b>32,326,838.73</b>		<b>30,531,217.08</b>		<b>42,661,970.21</b>		<b>46,737,767.40</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur dan BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur, disusun dan diolah kembali.

Pada tahun 1994 besarnya LQ untuk sektor pertambangan & galian masih berada dibawah 1, namun demikian sejak tahun 1995 LQ sektor pertambangan & galian mulai menunjukkan peningkatan diatas 1. Hal ini memperlihatkan bahwa beberapa lokasi pertambangan di wilayah kepulauan Madura mulai menunjukkan hasil yang signifikan, seperti di Kepulauan Kangean, dll. Lihat Tabel 8.

Sektor yang memberi kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB di SWP 3 Kabupaten Banyuwangi adalah sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel & restoran; sektor jasa-jasa; dan sektor industri pengolahan. Namun demikian sektor yang dominan yang mempunyai LQ > 1 adalah sektor pertanian; sektor pengangkutan & komunikasi; sektor jasa-jasa; sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan; serta sektor pertambangan & galian. Sektor pertanian disamping memberi andil terbesar terhadap pembentukan PDRB di SWP 3 juga menunjukkan nilai LQ terbesar diatas 1 dibanding sektor-sektor lain di SWP 3, yaitu LQ = 1,689. Sektor pengangkutan & komunikasi merupakan sektor yang mempunyai LQ terbesar kedua sebesar 1,553 Sektor pertambangan & galian cenderung mengalami kemerosotan, baik kontribusinya terhadap pembentukan PDRB di SWP 3 sendiri, maupun perannya terhadap perekonomian Jawa Timur secara keseluruhan. Sektor-sektor yang memiliki nilai LQ > 1 tersebut apabila dikembangkan akan memberikan andil yang cukup besar terhadap peran perekonomian di Jawa Timur. Lihat Tabel 9.

Sedangkan sektor-sektor yang memberi kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB di SWP 4 adalah sektor pertanian; sektor perdagangan hotel & restoran; serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor industri pengolahan cenderung memiliki andil yang semakin meningkat, tetapi nilai LQ nya masih dibawah 1. Apabila dilihat dari nilai LQ nya, maka sektor-sektor yang mempunyai nilai LQ diatas 1 adalah sektor pertanian; sektor jasa-jasa; serta sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan.

Pada SWP 4 ini yang meliputi Kabupaten Jember dan sekitarnya, sektor pertanian sangat berperan sekali, baik terhadap kontribusi pembentukan PDRB di SWP 4 ini maupun dilihat dari perannya terhadap perekonomian di SWP 4 terhadap perekonomian di Jawa Timur. Pada Tabel 10 menunjukkan nilai LQ sektor pertanian

TABEL 8  
 PDRB JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA UNTUK SWP 2  
 ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU (JUTA RP)  
 TAHUN 1994 - 1999

Sektor	Tahun 1994		Tahun 1995		Tahun 1996		Tahun 1997		Tahun 1998		Tahun 1999	
	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ
1 Pertanian	853,907.30	2.354	928,355.50	2.459	1,061,805.67	2.451	1,224,672.12	2.081	2,423,688.83	1.957	2,918,581.83	1.920
2 Pertambangan&Penggalian	31,131.22	0.849	40,914.39	0.998	73,042.63	2.297	194,707.82	3.853	542,320.70	10.023	768,482.83	10.622
3 Industri Pengolahan	65,463.92	0.119	77,960.25	0.123	90,680.26	0.122	107,795.16	0.128	140,562.47	0.099	153,039.87	0.084
4 Listrik,Gas&Air Bersih	7,777.95	0.249	9,949.85	0.243	11,402.02	0.180	14,074.39	0.267	17,941.52	0.239	22,942.98	0.217
5 Konstruksi	77,822.21	0.584	88,398.59	0.586	103,358.61	0.590	116,046.25	0.562	134,078.27	0.465	140,663.34	0.444
6 Perdagangan,Hotel&Rest.	400,937.94	0.960	463,125.47	0.984	526,848.78	0.978	634,162.18	0.971	1,076,208.46	0.864	1,184,009.37	0.805
7 Pengangkutan&Komunikasi	70,227.70	0.552	79,996.54	0.575	95,101.33	0.567	100,308.34	0.534	147,733.42	0.448	151,928.72	0.394
8 Keuangan, Persewaan dll	128,321.48	0.948	145,757.24	0.979	160,768.93	0.955	181,322.96	0.922	216,905.83	0.929	230,729.68	0.893
9 Jasa - Jasa	377,108.86	1.717	407,077.07	1.728	481,275.66	1.769	523,384.19	1.643	685,564.60	1.385	803,759.23	1.307
<b>PDRB SWP 2</b>	<b>2,012,496.58</b>		<b>2,239,534.90</b>		<b>2,584,284.09</b>		<b>3,086,473.41</b>		<b>5,385,004.10</b>		<b>6,374,137.85</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur dan BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur, disusun dan diolah kembali.



TABEL 9  
 PDRB JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA UNTUK SWP 3  
 ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU (JUTA RP)  
 TAHUN 1994 - 1999

Sektor	Tahun 1994		Tahun 1995		Tahun 1996		Tahun 1997		Tahun 1998		Tahun 1999	
	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ
1 Pertanian	559,374.82	1.739	601,270.79	1.776	702,363.53	1.797	817,763.28	1.989	1,609,832.97	1.658	1,918,984.93	1.689
2 Pertmbangn&Penggalian	44,297.79	1.362	49,789.07	1.351	55,569.96	1.937	48,951.05	1.330	44,780.80	1.056	48,384.39	0.895
3 Industri Pengolahan	196,949.05	0.405	235,972.13	0.413	272,834.79	0.406	319,992.94	0.544	377,852.05	0.338	398,204.28	0.327
4 Listrik, Gas&Air Bersih	13,858.76	0.500	18,740.02	0.509	21,608.99	0.378	26,661.55	0.725	31,096.21	0.528	38,302.10	0.485
5 Konstruksi	78,128.44	0.662	91,270.97	0.673	103,179.87	0.652	118,187.60	0.819	170,855.44	0.756	169,233.14	0.715
6 Perdgngan, Hotel&Rest.	322,833.60	0.872	375,488.94	0.888	428,336.31	0.861	495,971.74	1.087	845,234.78	0.865	970,889.19	0.883
7 Pengangkdn&Komunikasi	192,282.78	1.705	222,189.65	1.779	270,354.88	1.785	304,995.76	2.325	453,133.32	1.754	448,066.23	1.553
8 Keungan, Pensewaan dll	128,191.66	1.068	145,017.48	1.084	162,635.57	1.071	172,925.94	1.259	192,912.41	1.054	199,182.55	1.032
9 Jasa - Jasa	248,771.58	1.277	272,784.22	1.268	315,521.52	1.340	355,587.35	1.568	496,441.25	1.279	572,407.65	1.246
<b>PDRB SWP 3</b>	<b>1,784,688.48</b>		<b>2,012,523.27</b>		<b>2,332,425.42</b>		<b>2,163,065.47</b>		<b>4,222,139.23</b>		<b>4,763,654.46</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur dan BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur, disusun dan diolah kembali.

ini adalah 1,892. Sehingga sektor pertanian di wilayah SWP 4 ini sangat penting sekali untuk diperhatikan.

Sektor yang memberi kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB di SWP 5 adalah sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel & restoran; sektor industri pengolahan; dan sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor yang mempunyai  $LQ > 1$  dan merupakan sektor yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Jawa Timur adalah sektor pertanian; sektor konstruksi; sektor jasa-jasa; dan sektor pengangkutan & komunikasi. Sektor pengangkutan dan komunikasi ini cenderung mengalami penurunan nilai LQ nya. Pada tahun 1999 nilai LQ sektor ini sudah berada dibawah nilai 1, sehingga perlu untuk diperhatikan penanganannya agar nilainya tidak semakin merosot.

Sedangkan untuk sektor pertanian, baik kontribusinya terhadap pembentukan PDRB di SWP 5 maupun nilai LQ nya selalu menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa untuk SWP 5 yang meliputi Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kotamadya Probolinggo, sektor pertanian ini dapat dijadikan *leading sector*. Hal ini dapat dimengerti karena pada wilayah ini terdapat banyak perkebunan yang merupakan subsektor pertanian. Lihat Tabel 11.

Sedangkan sektor yang memberi kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB di SWP 6 adalah sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel & restoran; sektor pertanian; serta sektor jasa-jasa. Sektor pengangkutan & komunikasi; serta sektor konstruksi mempunyai kecenderungan kontribusi yang semakin besar pada pembentukan PDRB di SWP 6. Sedangkan sektor yang mempunyai  $LQ > 1$  dan merupakan sektor yang diharapkan ikut meningkatkan perekonomian di Jawa Timur adalah sektor perdagangan, hotel & restoran; sektor listrik, gas & air bersih; sektor pengangkutan & komunikasi; serta sektor konstruksi. Sedangkan sektor industri pengolahan serta sektor jasa-jasa mempunyai kecenderungan LQ sama dengan 1. Dan untuk sektor industri pengolahan semakin menunjukkan perannya dari tahun ke tahun. Hal ini konsisten dengan semakin banyaknya berdiri perusahaan-perusahaan di wilayah SWP 6 ini. Lihat Tabel 12.

TABEL 10  
 PDRB JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA UNTUK SWP 4  
 ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU (JUTA RP)  
 TAHUN 1994 - 1999

Sektor	Tahun 1994		Tahun 1995		Tahun 1996		Tahun 1997		Tahun 1998		Tahun 1999	
	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ
1 Pertanian	1,189,764.16	2.046	1,272,365.44	2.035	1,450,883.99	2.105	1,696,184.68	1.897	3,354,002.63	1.877	4,025,929.47	1.892
2 Pertmbagn&Penggajian	28,199.95	0.480	33,105.31	0.487	36,849.66	0.728	30,185.27	0.393	20,893.70	0.268	24,280.22	0.240
3 Industri Pengolahan	164,875.11	0.187	200,032.35	0.190	236,159.49	0.199	281,164.16	0.220	395,878.58	0.193	423,631.37	0.186
4 Listrik, Gas&Air Bersih	24,060.50	0.480	33,116.61	0.487	37,198.80	0.369	45,266.38	0.566	48,017.35	0.443	56,844.73	0.384
5 Konstruksi	189,786.56	0.890	221,168.59	0.883	251,487.36	0.902	281,574.20	0.897	353,419.81	0.850	363,509.25	0.820
6 Perdgngan, Hotel&Rest.	632,425.96	0.945	728,690.85	0.933	824,871.99	0.962	960,918.03	0.968	1,715,785.63	0.954	1,928,718.81	0.937
7 Pengangkdn&Komunikasi	179,723.53	0.882	203,968.00	0.884	257,594.42	0.965	283,088.53	1.027	424,896.74	0.864	457,264.71	0.847
8 Keuangan, Persewaan dll	288,216.14	1.236	306,464.43	1.241	338,993.25	1.266	351,400.65	1.176	397,575.52	1.180	401,821.97	1.112
9 Jasa - Jasa	548,743.70	1.558	718,312.92	1.837	677,851.86	1.633	766,028.62	1.582	1,059,917.94	1.484	1,238,009.18	1.439
<b>PDRB SWP 4</b>	<b>3,225,795.61</b>		<b>3,717,224.50</b>		<b>4,111,890.82</b>		<b>4,705,820.72</b>		<b>7,770,387.90</b>		<b>8,920,009.71</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur dan BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur, disusun dan diolah kembali.

TABEL 11  
PDRB JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA UNTUK SWP 5  
ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU (JUTA RP)  
TAHUN 1994 - 1999

Sektor	Tahun 1994		Tahun 1995		Tahun 1996		Tahun 1997		Tahun 1998		Tahun 1999	
	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ
1 Pertanian	910,616.91	1.835	980,689.31	1.877	1,125,593.95	1.876	1,364,395.16	1.720	2,667,075.76	1.740	3,126,926.58	1.753
2 Pertmbangn&Penggalian	19,775.60	0.394	28,591.37	0.503	33,043.72	0.750	28,381.40	0.417	18,577.31	0.277	20,384.35	0.240
3 Industri Pengolahan	338,115.82	0.450	401,823.11	0.456	472,090.84	0.457	555,101.40	0.489	819,552.21	0.481	863,372.51	0.452
4 Listrik, Gas&Air Bersih	36,175.61	0.846	49,885.96	0.878	58,026.09	0.639	68,488.00	0.966	74,705.02	0.804	94,105.40	0.759
5 Konstruksi	212,485.58	1.168	244,154.05	1.166	287,403.06	1.184	327,633.27	1.177	390,028.31	1.065	382,205.73	1.028
6 Perdgngan, Hotel&Rest.	542,720.02	0.950	626,818.68	0.960	713,845.11	0.957	842,210.39	0.957	1,392,893.84	0.903	1,543,526.53	0.895
7 Pengangkdn&Komunikasi	191,085.89	1.098	218,953.36	1.136	263,527.33	1.133	283,816.96	1.122	415,376.51	1.018	444,469.83	0.981
8 Keuangan, Persewaan dll	162,325.92	0.877	185,714.32	0.900	209,117.70	0.897	228,389.71	0.862	259,449.06	0.898	267,529.58	0.883
9 Jasa - Jasa	339,950.42	1.131	369,683.59	1.131	419,469.62	1.161	474,179.20	1.105	637,695.29	1.041	735,786.47	1.020
PDRB SWP 5	2,753,251.77		3,106,113.75		3,560,117.42		4,172,605.49		6,665,353.31		7,478,306.98	

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur dan BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur, disusun dan diolah kembali.

TABEL 12  
 PDRB JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA UNTUK SWP 6  
 ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU (JUTA RP)  
 TAHUN 1994 - 1999

Sektor	Tahun 1994		Tahun 1995		Tahun 1996		Tahun 1997		Tahun 1998		Tahun 1999	
	Rp	LO	Rp	LO	Rp	LO	Rp	LO	Rp	LO	Rp	LO
1 Pertanian	1,177,489.64	0.897	1,300,417.90	0.911	1,523,467.61	0.874	1,763,289.38	0.811	3,484,346.14	0.854	4,075,875.44	0.861
2 Pertmbangn&Penggalian	97,800.59	0.737	122,787.33	0.791	126,041.20	0.965	110,739.32	0.593	59,728.65	0.335	72,005.08	0.320
3 Industri Pengolahan	1,908,646.59	0.961	2,331,031.40	0.968	2,800,975.41	0.934	3,271,509.32	1.051	4,673,914.44	0.996	5,184,053.66	1.022
4 Listrik, Gas&Air Bersih	118,653.65	1.049	160,095.29	1.032	663,361.44	2.603	221,876.59	1.140	282,790.22	1.143	350,480.12	1.065
5 Konstruksi	521,296.21	1.083	622,671.99	1.089	725,367.80	1.028	820,138.32	1.074	1,048,634.90	1.104	1,088,960.56	1.104
6 Perdagangan, Hotel&Rest.	1,690,903.38	1.119	1,977,874.50	1.110	2,288,925.94	1.055	2,741,268.78	1.136	4,739,918.12	1.155	5,267,540.09	1.151
7 Pengangkutan&Komunikasi	516,674.19	1.123	576,034.76	1.094	702,977.56	1.040	763,739.66	1.100	1,179,869.39	1.087	1,272,815.61	1.059
8 Keuangan, Persewaan dll	449,448.71	0.918	510,954.60	0.906	579,289.37	0.855	637,351.71	0.877	718,916.44	0.935	734,915.55	0.914
9 Jasa - Jasa	800,281.21	1.007	880,497.08	0.987	993,035.83	0.946	1,115,793.86	0.948	1,550,584.86	0.951	1,799,559.96	0.940
<b>PDRB SWP 6</b>	<b>7,281,196.17</b>		<b>8,482,364.85</b>		<b>10,403,442.16</b>		<b>11,445,726.94</b>		<b>17,738,703.16</b>		<b>19,846,206.07</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur dan BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur, disusun dan diolah kembali.

Sektor-sektor yang memberi kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB di SWP 7 adalah sektor industri pengolahan; sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel & restoran; serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor yang mempunyai  $LQ > 1$  adalah sektor industri pengolahan. Sedangkan nilai  $LQ$  untuk sektor pertanian; sektor jasa-jasa; serta sektor perdagangan, hotel & restoran cenderung mengalami penurunan. Hal ini memberi arti bahwa untuk ketiga sektor ini di SWP 7 perannya relatif cenderung merosot dibandingkan dengan wilayah Jawa Timur secara keseluruhan.

Sedangkan untuk sektor industri pengolahan di SWP 7 diharapkan dapat ikut memacu perkembangan perekonomian di Jawa Timur. Sektor industri pengolahan ini banyak terdapat di Kotamadya Kediri (seperti pabrik rokok terbesar di Indonesia P.T. Gudang Garam) serta beberapa industri pengolahan yang tersebar di Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, dll. Lihat Tabel 13.

Di wilayah SWP 8, sektor-sektor yang memberi kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB di SWP 8 adalah sektor pertanian; sektor jasa-jasa ; serta sektor perdagangan, hotel & restoran. Sedangkan untuk sektor yang mempunyai  $LQ > 1$  adalah sektor pertanian; sektor jasa-jasa; serta sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan. Ketiga sektor ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di wilayah SWP 8 dan terhadap perekonomian di Jawa Timur pada umumnya. Lihat Tabel 14.

Sedangkan sektor-sektor yang memberi kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB di SWP 9 adalah sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel & restoran; sektor industri pengolahan; sektor jasa-jasa; serta sektor pertambangan & penggalian. Sedangkan sektor yang mempunyai  $LQ > 1$  dan diharapkan dapat memacu perkembangan perekonomian di SWP 9 maupun terhadap perekonomian di Jawa Timur adalah sektor pertambangan & penggalian; sektor pertanian; serta sektor jasa-jasa. Sektor pertambangan & galian merupakan primadona di wilayah SWP 9. sektor ini banyak terdapat di wilayah kabupaten Tuban. Sektor perdagangan, hotel & restoran dan sektor konstruksi juga mempunyai kecenderungan nilai  $LQ$  yang semakin mendekati satu, sehingga patut juga untuk lebih diprioritaskan penanganannya. Lihat Tabel 15.

TABEL 13  
 PDRB JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA UNTUK SWP 7  
 ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU (JUTA RP)  
 TAHUN 1994 - 1999

Sektor	Tahun 1994		Tahun 1995		Tahun 1996		Tahun 1997		Tahun 1998		Tahun 1999	
	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ
1 Pertanian	1,797,349.99	0.969	1,948,031.80	0.975	2,306,438.78	1.002	3,360,745.49	1.080	5,235,987.49	0.830	6,112,713.43	0.850
2 Pertmbangn&Penggalian	43,876.06	0.234	40,082.17	0.184	49,516.01	0.293	43,551.04	0.163	37,389.08	0.136	43,482.12	0.127
3 Industri Pengolahan	4,211,811.64	1.500	5,068,512.94	1.503	5,847,301.72	1.477	6,562,153.94	1.473	12,588,862.01	1.734	13,345,451.31	1.731
4 Listrik,Gas&Air Bersih	58,583.49	0.366	79,429.14	0.366	90,748.73	0.270	110,696.48	0.398	140,683.48	0.368	178,118.70	0.356
5 Konstruksi	339,022.30	0.498	392,171.79	0.490	457,582.46	0.492	522,016.22	0.478	688,995.23	0.469	712,154.06	0.475
6 Perdngan,Hotel&Rest.	1,734,769.13	0.812	2,005,830.00	0.804	2,285,068.54	0.798	2,775,476.39	0.804	4,672,646.50	0.736	5,230,669.00	0.752
7 Pengangktn&Komunikasi	387,820.23	0.596	442,185.93	0.600	545,823.51	0.612	598,821.43	0.603	894,337.07	0.533	959,470.59	0.525
8 Keuangan, Persewaan dll	568,854.39	0.822	643,788.58	0.816	736,875.62	0.824	811,120.06	0.780	953,748.74	0.802	1,015,544.26	0.831
9 Jasa - Jasa	1,150,375.45	1.024	1,252,935.48	1.003	1,410,377.09	1.018	1,589,820.94	0.944	2,213,602.06	0.876	2,565,265.67	0.882
<b>PDRB SWP 7</b>	<b>10,292,262.68</b>		<b>11,870,967.83</b>		<b>13,729,732.44</b>		<b>16,374,401.99</b>		<b>27,426,251.66</b>		<b>30,162,869.14</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur dan BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur, disusun dan diolah kembali.

TABEL 14  
 PDRB JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA UNTUK SWP 8  
 ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU (JUTA RP)  
 TAHUN 1994 - 1999

Sektor	Tahun 1994		Tahun 1995		Tahun 1996		Tahun 1997		Tahun 1998		Tahun 1999	
	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ
1 Pertanian	1,229,110.71	2.108	1,245,869.92	2.107	1,558,057.04	2.238	1,799,177.68	1.971	3,452,809.35	1.921	3,998,608.22	1.954
2 Pertmbangn&Penggalian	12,499.68	0.212	13,400.33	0.208	16,216.16	0.317	14,458.90	0.184	13,495.14	0.172	13,852.29	0.142
3 Industri Pengolahan	133,217.71	0.151	162,930.44	0.163	191,538.32	0.160	226,324.53	0.173	293,325.44	0.142	332,354.66	0.152
4 Listrik, Gas&Air Bersih	22,677.18	0.451	29,757.20	0.463	33,843.14	0.333	41,580.30	0.509	53,139.60	0.488	64,671.41	0.455
5 Konstruksi	187,380.83	0.877	218,096.06	0.921	253,069.95	0.898	285,145.95	0.860	353,608.65	0.845	362,539.18	0.850
6 Perodngan, Hotel&Rest.	602,155.45	0.897	693,251.33	0.938	787,156.66	0.909	944,820.52	0.933	1,574,665.44	0.870	1,474,758.44	0.745
7 Pengangkn&Komunikasi	155,966.06	0.763	177,784.95	0.815	215,841.62	0.800	230,980.58	0.793	355,158.66	0.742	388,896.56	0.749
8 Keuangan, Persewaan dll	217,358.62	0.999	248,387.10	1.063	278,189.28	1.028	332,952.08	1.062	386,869.85	1.142	396,294.20	1.140
9 Jasa - Jasa	673,674.27	1.908	726,068.28	1.963	820,406.16	1.957	928,282.22	1.878	1,334,380.57	1.857	1,547,097.58	1.870
<b>PDRB SWP 8</b>	<b>3,234,040.51</b>		<b>3,515,545.61</b>		<b>4,154,318.33</b>		<b>4,803,722.76</b>		<b>7,817,452.70</b>		<b>8,579,072.54</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur dan BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur, disusun dan diolah kembali



TABEL 15  
PDRB JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA UNTUK SWP 9  
ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU (JUTA RP)  
TAHUN 1994 - 1999

Sektor	Tahun 1994		Tahun 1995		Tahun 1996		Tahun 1997		Tahun 1998		Tahun 1999	
	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ	Rp	LQ
1 Pertanian	819,021.94	1.750	890,505.99	1.791	1,010,719.07	1.766	1,149,643.30	1.579	2,148,461.94	1.697	2,520,331.23	1.683
2 Pertambangan&Penggalian	294,884.19	6.235	347,594.01	6.426	394,336.70	9.383	352,526.50	5.637	228,128.41	4.122	270,967.12	3.802
3 Industri Pengolahan	329,197.68	0.465	399,394.96	0.476	495,543.90	0.503	582,609.40	0.556	587,129.20	0.403	649,384.63	0.405
4 Listrik,Gas&Air Bersih	9,820.66	0.244	13,595.63	0.252	15,390.52	0.184	18,635.64	0.286	24,160.07	0.315	29,753.06	0.286
5 Konstruksi	154,487.31	0.900	185,769.56	0.933	217,259.50	0.938	246,596.81	0.965	285,636.33	0.969	311,045.66	0.997
6 Perdagangan,Hotel&Rest.	440,934.69	0.819	515,239.23	0.830	594,156.91	0.835	723,594.49	0.896	1,241,847.23	0.974	1,377,866.37	0.951
7 Pengangkutan&Komunikasi	83,105.28	0.507	94,022.44	0.513	114,422.71	0.516	122,542.32	0.527	194,393.34	0.577	218,050.87	0.573
8 Keuangan, Persewaan dll	132,366.76	0.758	153,241.60	0.780	172,371.02	0.775	184,039.91	0.758	202,828.57	0.850	212,402.72	0.835
9 Jasa - Jasa	331,720.32	1.171	355,517.05	1.144	401,307.11	1.164	451,513.18	1.145	594,966.81	1.175	689,389.76	1.138
PDRB SWP 9	2,595,638.83		2,954,880.67		3,415,507.44		3,831,701.55		5,507,551.90		6,279,191.42	

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur dan BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur, disusun dan diolah kembali.

## **BAB 6**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Simpulan**

1. Sektor-sektor yang perlu dikembangkan di tiap SWP berbeda-beda. Untuk menentukan sektor apa yang perlu dikembangkan di masing-masing SWP dapat ditentukan dari nilai LQ nya yang lebih besar dari satu, yaitu :
  - SWP 1 : sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel & restoran; sektor listrik, gas & air bersih; sektor konstruksi; sektor pengangkutan & komunikasi; dan sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan.
  - SWP 2 : sektor pertambangan & galian; sektor pertanian; dan sektor jasa-jasa.
  - SWP 3 : sektor pertanian; sektor pengangkutan & komunikasi; sektor jasa-jasa; sektor keuangan , persewaan & jasa perusahaan.
  - SWP 4 : sektor pertanian; sektor jasa-jasa; sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan.
  - SWP 5 : sektor pertanian; sektor konstruksi; sektor jasa-jasa; serta sektor pengangkutan & komunikasi.
  - SWP 6 : sektor perdagangan, hotel & restoran; sektor pengangkutan & komunikasi; sektor konstruksi; sektor listrik, gas & air bersih; serta sektor industri pengolahan.
  - SWP 7 : sektor industri pengolahan; disamping itu yang mempunyai kecenderungan peningkatan peran sektorial adalah sektor pertanian; dan sektor jasa-jasa.
  - SWP 8 : sektor sektor pertanian; sektor jasa-jasa; dan sektor pengangkutan & komunikasi.

- SWP 9 : sektor pertambangan & galian; sektor pertanian; dan sektor jasa-jasa. Sektor konstruksi juga perlu untuk dikembangkan potensinya, karena LQ nya mempunyai kecenderungan meningkat sampai mendekati angka 1.
2. Kondisi perekonomian di Jawa Timur secara umum sangat dipengaruhi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian; sektor industri pengolahan; serta sektor perdagangan, hotel & restoran. Sektor industri pengolahan; serta sektor perdagangan, hotel & restoran sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Jawa Timur. Sedangkan sektor pertanian, walaupun kontribusinya besar kurang mempengaruhi conjungtur perekonomian di Jawa Timur.

## 6.2 Saran – Saran

Secara umum ternyata sektor pertanian masih mendominasi perekonomiann di tiap SWP maupun perekonomian di Jawa Timur pada umumnya walaupun secara conjungtur kurang mempengaruhi perekonomian di Jawa Timur. Namun demikian pemerintah Jawa Timur hendaknya bersama-sama pemerintahan di Daerah Tingkat II perlu mempunyai "*good will*" untuk mengembangkan potensi di sektor pertanian ini. Sehingga dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi di Jawa Timur ini selain sektor industri dan sektor perdagangan, hotel & restoran yang memang mempunyai tingkat akselerasi pertumbuhan yang cepat maka perlu pula secara serius mengembangkan di sektor pertanian.

Mengembangkan sektor industri yang kuat dengan ditopang kekuatan di sektor pertanian yang tangguh hendaknya tidak hanya slogan semata, tetapi perlu pula untuk diupayakan implementasinya sehingga Jawa Timur mampu untuk bertahan terhadap gejolak eksternal yang mungkin timbul seperti krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang lalu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Iwan Jaya, 1994, *Ilmu Ekonomi Regional Dan Beberapa Aplikasinya Di Indonesia*, Bibliografi, LPFE-UI, Jakarta.
- Glasson, John, 1990, *Pengantar Perencanaan Regional*, terjemahan, edisi kedua, LPFE-UI, Jakarta.
- Kadariah, 1982, *Ekonomi Perencanaan*, LPFE-UI, Jakarta.
- Kantor Statistik Jawa Timur, *Jawa Timur Dalam Angka 1997*, Surabaya.
- Prathama Rahardja & Mandala Manurung, 2001, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, LPFE-UI, Jakarta.
- , *PDRB Jawa Timur Menurut Satuan Wilayah Pembangunan*, Surabaya.
- Richardson, Harry W, 1991, *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*, LPFE-UI, terjemahan, Jakarta.
- Samuelson, Paul Anthony & Nordhaus, William D, 1998, *Economics*, 16<sup>th</sup> edition, Irwin McGraw-Hill, United States of America.
- Sinulingga, Budi D, 1999, *Pembangunan Kota Tinjauan Regional Dan Lokal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sujamto, 1988, *Cakrawala Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahyuni, Endah S, Juli Winarni, Ermila B.K., 1999, *Analisa Pembangunan Daerah Satuan Wilayah Pembangunan VII Dengan Pendekatan Shift-Share Analysis*, makalah, FE-Unair, Surabaya.

## Lampiran I

- PERSONALIA PENELITIAN :**
1. **Ketua Peneliti :**
    - a. Nama Lengkap & Gelar : Drs. Ec. Bustani Berachim
    - b. Gol. Pangkat & NIP : IV/a, 130 541 823
    - c. Jabatan Fungsional : Dosen
    - d. Jabatan Struktural : --
    - e. Fakultas/Program Studi : Fak. Ekonomi / Ekonomi Pembangunan
    - f. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
    - g. Bidang Keahlian : Ilmu Ekonomi
    - h. Waktu penelitian : 25 jam / minggu
  2. **Susunan Tim Peneliti :**
    - a. Nama anggota : Nurul Istifadah, SE
    - b. Gol. Pangkat & NIP : III/a, 132 205 435
    - c. Jabatan Fungsional : Dosen
    - d. Jabatan Struktural : --
  3. **Tenaga Lapangan/Teknisi : --**
  4. **Pekerja Lapangan/Pencacah : --**
  5. **Tenaga Administrasi : Ismail**

**RIWAYAT HIDUP KETUA PENELITI :**

1. Nama Lengkap : Drs. Ec. H. Bustani Berachim
2. Umur / Jenis kelamin / Agama : 55 tahun / Laki-laki / Islam
3. Alamat : Kedondong Lor IV / 16 Surabaya
4. Pangkat / Golongan / NIP : IVa/ 130 541 823
5. Jabatan pokok : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
6. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
7. Alamat Kantor : Jl. Airlangga 4 Surabaya
8. Riwayat Pendidikan Tinggi : Fakultas Ekonomi  
Universitas Airlangga Surabaya,  
lulus tahun 1981.
9. Publikasi Hasil Penelitian :
  - a. Manfaat Pengembangan Tanaman Kenaf Untuk Serat Karung Bagi Petani Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, tahun 1989.
  - b. Analisa Masalah Tenaga Kerja Dan Perkembangannya Pada Periode Pembangunan 1961–1989, tahun 1989.
  - c. Analisa Pergeseran Struktur Ekonomi Dalam Kaitan Usaha Pembangunan Sarana Dan Pengembangan Industri Periode 1969--1986, tahun 1990.
  - d. Perubahan Struktur Ekonomi Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tahun 1993.